

Mata Kuliah : Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan  
 Kode/Bobot/Semester : TPI 2.08.1.2/2 SKS (1-1)/I  
 Capaian Pembelajaran : Mampu melaksanakan prinsip-prinsip hukum perkapalan dan perikanan, penggolongan, tugas dan kewajiban orang-orang dalam usaha perkapalan dan perikanan, syarat-syarat bekerja, surat-surat penting dan mampu menerapkannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Kompetensi	Sub Kompetensi / Pokok Bahasan	Tatap Muka ke
1	Menjelaskan pengertian hukum, klasifikasi kapal dan istilah-istilah di bidang kelautan dan perikanan	Ketentuan umum hukum maritim dan perikanan, <i>Cape Town Agreement (CTA)</i> , <i>International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)</i>	1
2	Mengidentifikasi penggolongan orang-orang dalam usaha perkapalan	2.1 Penggolongan orang-orang dalam usaha perkapalan	2
		2.2 Klasifikasi Nelayan berdasarkan perairan	
3	Mengidentifikasi syarat-syarat untuk bekerja di kapal, hak dan kewajiban awak kapal	Syarat-syarat untuk bekerja di kapal, STCW-F	3
4	Menelaah maksud utama, pengecualian dan pemberlakuan ketentuan umum ordonansi kapal 1935	4.1 Jenis sertifikat dan dokumen kapal	4
		4.2 Penerapan dokumen-dokumen kapal	
		4.3 Peraturan-peraturan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan SOLAS 1974	5
5	Mengidentifikasi Struktur organisasi / jabatan di kapal	1.1 Struktur organisasi/jabatan di kapal	6
		1.2 Hak dan kewajiban awak kapal	
6	Mengidentifikasi pengertian dan ketentuan-ketentuan tentang ordonansi karantina	6.1 Jenis dokumen muatan	7
		6.2 Marine insurance di kapal perikanan	
Ujian Tengah Semester			8
7	Mengidentifikasi perihal mahkamah pelayaran	Mahkamah pelayaran	9

<b>No</b>	<b>Kompetensi</b>	<b>Sub Kompetensi / Pokok Bahasan</b>	<b>Tatap Muka</b>
8	Mengidentifikasi batas-batas, zona dan kewenangan yurisdiksinya, serta wilayah/kawasan maritim	8.1 Zona-zona Laut UNCLOS	10
		8.2 Kewenangan yurisdiksi masing-masing zona	
		8.3 Kewenangan pengelolaan perikanan di Kawasan yang dikelola RFMO	11
9	Mengidentifikasi jalur-jalur penangkapan ikan, dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia	9.1 Jalur Penangkapan ikan	12
		9.2 Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia	13
10	Mengidentifikasi dan menerapkan perijinan dan jenis usaha perikanan, hukum perkapalan dan perikanan	Perijinan dan jenis usaha perikanan	14
		10.1 Praktik menerapkan hukum perkapalan dan perikanan	
		10.2 Permasalahan di dunia perikanan	15
<b>Ujian Akhir Semester</b>			<b>16</b>

Daftar Pustaka:

1. Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008. Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kelautan dan Perikanan. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kelautan dan Perikanan. Jakarta.
2. Harahap, S. 1993. Aspek-aspek Hukum Pengawasan dan Hubungan Kerja di Kapal Niaga. Yayasan Bakti Samudera, Jakarta.
3. Jatim, R dan Abriel. Undang-undang Perkapalan.
4. Koers, WA, 1992. Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Presiden (PERPRES) No. 18 tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995).
7. Soebekti, R, 2004. Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
8. Soebekti, R. 1998. Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut. Yayasan Pendidikan Pelayaran "Djadajat-1963. Jakarta.
9. Soedjoko, W. Hukum Perkapalan dan Pengangkutan Laut.
10. Suparni, N. KUHD dan Kepailitan.

11. The Torremolinos Protocol of 1993 Relating to The Torremolinos International Convention For The Safety of Fishing Vessels, 1977, As Modified By The Cape Town Agreement of 2012.
12. Tirtamulia, T, 2011. Zona-zona Laut UNCLOS. Brilian Internasional. Surabaya.
13. Tribawono, D. 2002. Hukum Perikanan Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
14. Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
15. Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
16. Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
17. Undang-undang No. 6 tentang Perairan Indonesia.